

MENENGGOK KRITERIA KEMISKINAN DI INDONESIA: MENIMBANG INDIKATOR KEMISKINAN BERBASIS HAK¹

Edi Suharto, PhD²

Abstract

THIS PAPER explained how Indonesian economic and human development based poverty assessment should be complemented by right based criteria. The reason is based on critical examination conducted by the writer toward the flaws of both approaches and its implication on understanding poverty. The writer proposed a conceptual framework for right-based assessment, indicators, and determination of poverty criteria. It's believed that implementation of this framework would give a stronger informational foundation for poverty alleviation policy oriented to changing external causing factors.

(**Keywords:** Poverty, Poverty criteria, Basic rights)

Pendahuluan

Masalah kemiskinan merupakan isu krusial di Indonesia sejak dahulu hingga detik ini. Melihat jumlah dan kecenderungannya, kemiskinan di negeri ini tampaknya bukan lagi merupakan kejadian yang sifatnya sementara (*transient event*), melainkan sudah menjadi fenomena massal yang kronis dan mendalam. Bahkan pada

banyak kasus, kemiskinan sudah bersifat antar-generasi.

Berbagai strategi telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dengan menghabiskan dana sangat besar. Di Indonesia biaya penanggulangan kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2004 “baru” Rp.18 triliun, maka satu tahun berikutnya menjadi Rp.23 triliun.

¹⁾ Disampaikan pada Lokakarya Kemiskinan “Konsensus atau Keberagaman? Upaya Meninjau Ulang Kriteria Kemiskinan di Indonesia”, Yayasan Akatiga, Gedung Widjojo Centre/YTKI, Jakarta 28 Agustus 2008

²⁾ Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Bandung; Dosen Program Pascasarjana Spesialis Pekerjaan Sosial STKS Bandung, Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat, IPB, dan Program Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta & McGill University, Kanada; Konsultan Plan International Indonesia (2007-2008); International Policy Analyst, Local Governance Initiative (LGI), Hungary (2008-2009). Web: www.policy.hu/suharto Email: suharto@policy.hu

Pada tahun 2006 anggaran ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp.42 triliun, dan untuk tahun 2007 dialokasikan sebesar Rp.51 triliun (*Suara Pembaruan*, 2007; Suharto, 2008b).

Diskusi tentang kemiskinan terus dilakukan dan diseminarkan di hotel-hotel berbintang. Tidak sedikit konsultan, manajer program dan pekerja-pekerja sosial yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan malah berlimpah kekayaan. Kemiskinan adalah tragedi sekaligus “bisnis” kemanusiaan yang berkilaunan. Berbagai studi mengenai kemiskinan juga telah banyak dilakukan. Namun, hingga saat ini kesepahaman tentang kemiskinan masih belum dicapai secara mantap. Karenanya, upaya untuk memperkokoh kriteria dan indikator kemiskinan perlu terus dilakukan.

Berporos pada pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), makalah ini akan mendiskusikan kriteria kemiskinan sebagai basis untuk menggagas indikator kemiskinan yang bisa dikembangkan di Indonesia. Meskipun masih sangat kasar, indikator-indikator yang disajikan pada dasarnya ingin menangkap *input variables* yang mempengaruhi kehidupan orang miskin, maupun *outcome variables* yang menunjukkan kualitas hidup mereka. Selain mencakup konteks tempat orang miskin berada, seperti situasi sosial-ekonomi keluarga dan kualitas kehidupan komunitas mereka, pendekatan ini juga mencoba mengintegrasikan hak-hak orang miskin (*rights holders*) dengan tanggung jawab para pemangku kewajiban (*duty bearers*).

Hegemoni Ekonomi

Harus diakui bahwa kriteria dan indika-

tor untuk mengukur kemiskinan di jagat raya ini masih didominasi pendekatan ekonomi. Sebagian besar pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma neo-liberal dan teori-teori modernisasi yang sangat mengagungkan pertumbuhan ekonomi dan produksi (*the production-centred model*) (Suharto, 2006).

Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, para ekonom dan ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan suatu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan”.

GNP memang dapat dijadikan ukuran untuk menelaah performa pembangunan suatu negara. Namun, banyak ahli menunjukkan kelemahan pendekatan ini. Haq (1995:46), misalnya, menyatakan bahwa GNP merefleksikan harga-harga pasar dalam bentuk nilai uang. Harga-harga tersebut mampu mencatat kekuatan ekonomi dan daya beli dalam sistem tersebut, akan tetapi harga-harga dan nilai uang tidak dapat mencatat distribusi, karakter, atau kualitas pertumbuhan ekonomi. GNP juga mengesampingkan segala aktivitas yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti pekerjaan rumah tangga, pertanian subsisten, atau pelayanan-pelayanan yang tidak dibayar. Dan yang lebih serius lagi, GNP memiliki dimensi-tunggal dan karenanya gagal menangkap aspek budaya, sosial, politik, dan pilihan-pilihan yang dilakukan manusia (Suharto, 2006).

Seperti halnya GNP, pendekatan *in-*

come poverty juga memiliki beberapa kekurangan. Menurut Satterthwaite (1997) sedikitnya ada tiga kelemahan pendekatan *income poverty*:

- Kurang memberi perhatian pada dimensi sosial dan bentuk-bentuk kesengsaraan orang miskin.
- Tidak mempertimbangkan keterlibatan orang miskin dalam menghadapi kemiskinannya.
- Tidak menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan.

Pembangunan Manusia

Karena pendekatan GNP dan *income poverty* memiliki kelemahan dalam memotret kemiskinan, sejak tahun 1970-an telah dikembangkan berbagai pendekatan alternatif. Di antaranya adalah kombinasi garis kemiskinan dan distribusi pendapatan yang dikembangkan Sen tahun 1973, *Social Accounting Matrix* (SAM) yang digagas Pyatt dan Round tahun 1977, serta *Physical Quality of Life Index* (PQLI) yang digulirkan Morris tahun 1977 (Suharto, 2006).

Di bawah kepemimpinan ekonom asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 1990-an UNDP memperkenalkan pendekatan Pembangunan Manusia (*Human Development*) yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*-HDI) serta beberapa variannya, seperti Indeks Kemiskinan Manusia dan Indeks Pembangunan Jender. Pendekatan ini relatif lebih komprehensif

dan mencakup faktor ekonomi dan sosial orang miskin. Berporos pada ide-ide *heterodox* dari paradigma *popular development*, pendekatan ini pada dasarnya memadukan model kebutuhan dasar (*basic needs model*) yang digagas oleh Paul Streeten dan konsep kapabilitas (*capability*) yang dikembangkan Pemenang Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen (Suharto, 2008a).

Indikator pokok Pembangunan Manusia menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan (*capability*) manusia. Dalam garis besar, pengukuran HDI difokuskan pada tiga dimensi yang dipandang paling penting bagi kehidupan manusia, yakni usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living standards*). Indikator angka harapan hidup dipakai guna menunjukkan usia hidup (dimensi umur panjang dan sehat); indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengukur keluaran dari dimensi pengetahuan; sedangkan indikator kemampuan daya beli dipakai untuk mempresentasikan dimensi hidup layak (Suharto, 2008b; UNDP, 2007; Suhaimi, 2001).³

Menuju Pendekatan Berbasis Hak

Bila dicermati, pendekatan pengukuran kemiskinan (baik GNP, *income poverty*, maupun Pembangunan Manusia) masih tetap menyimpan kelemahan. Konsepsinya masih melihat kemiskinan sebagai persoalan individu dan kurang memperhatikan

³) Meskipun esensinya tetap sama, ada sedikit perbedaan dalam sistem pengukuran dan penggunaan indikator antara UNDP dan BPS. Misalnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan UNDP menggunakan angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah. Sedangkan BPS memakai angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (lihat Suhaimi, 2001:1-4 untuk mengetahui metode dan teknik pengukuran HDI di Indonesia).

dimensi struktural. Sistem pengukuran yang digunakannya terfokus pada “kondisi” kemiskinan berdasarkan *negative outcome indicators*, sehingga belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan “kekuatan” orang miskin dan dinamika kemiskinannya. Akibatnya, orang miskin hanya dipandang sebagai “orang yang serba tidak memiliki”: tidak memiliki pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dan sebagainya. Aktor kemiskinan dan sebab-sebab yang mempengaruhinya juga belum tersentuh secara memadai. Si miskin dilihat hanya sebagai “korban pasif” pembangunan, bukan sebagai manusia (*human being*) yang memiliki “sesuatu” yang dapat digunakan olehnya, baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya, maupun mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya (*coping/livelihood strategies*).

Memang benar, dibandingkan dengan pendekatan GNP dan *income poverty*, pendekatan Pembangunan Manusia relatif lebih unggul karena menyentuh dimensi kualitas hidup dan kemampuan manusia. Bahkan sejak tahun 2000, pendekatan ini sudah mulai mencakup pentingnya dimensi hak-hak dasar sejalan dengan konvensi internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Dalam *Human Development Report* (HDR) 2000, misalnya, dinyatakan bahwa Pembangunan Manusia memiliki kedekatan dengan pengakuan terhadap struktur universal hak asasi manusia. Pada bagian “*What human rights add to human development*” ditegaskan bahwa “*Assessments of human development, if combined with the human*

rights perspective, can indicate the duties of others in the society to enhance human development.” (BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP, 2001: 7).

Namun demikian, HDI masih berpusat pada aspek *well-being*, dan masih belum mencakup aspek *well-becoming*. Selain masih belum mencakup dimensi lingkungan terdekat yang berpengaruh terhadap kemiskinan seseorang, HDI juga masih kurang menyentuh dimensi “pemangku kewajiban” (*duty bearers*) yang mengemban mandat memenuhi hak-hak dasar warga negara serta menyediakan pelayanan publik. Melengkapi pendekatan yang sudah ada, pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) di bawah ini kiranya dapat dipertimbangkan dan dikembangkan sebagai lensa untuk memotret kriteria dan indikator kemiskinan di Indonesia.

Pendekatan berbasis hak

Sangat umum diterima bahwa investasi bagi Pembangunan Manusia, seperti kesehatan dan pendidikan, sangat mempengaruhi produksi *human capital* dan masa depan kesejahteraan bangsa secara menyeluruh. Selain itu, jarang disangkal bahwa kemelaratan jangka pendek dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang kemudian berwujud pada kemiskinan pada periode dan bahkan generasi berikutnya. Oleh karena itu, terlepas dari pentingnya penggambaran kondisi kehidupan orang miskin saat ini (*current well-being*), pengukuran kemiskinan perlu memperhatikan kondisi kehidupan masa depan (*future well-becoming*). Perspektif seperti inilah yang mendasari kriteria dan indikator kemiskinan yang berpijak pada pendekatan

berbasis hak.

Pendekatan berbasis hak memperhatikan hubungan antara proses-proses makro-ekonomi dan strategi-strategi pengurangan kemiskinan yang menekankan pentingnya investasi sosial dalam mencegah dan mengurangi kemiskinan, serta mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan keadilan sosial dalam arti luas. Manfaat pendekatan ini adalah selain sesuai dengan agenda pembangunan nasional maupun internasional yang semakin dituntut untuk memperhatikan hak asasi manusia, juga sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan universal, seperti Millennium Development Goals (MDGs).

Bray dan Dawes (2007) menyatakan bahwa berbeda dengan pendekatan yang berbasis *well-being* atau kualitas hidup, pendekatan berbasis hak menempatkan pengukuran hasil (*outcomes*) dalam konteks otoritas moral terhadap hak dan kebijakan yang harus diterapkan untuk menjamin hak tersebut. Perhatiannya bukan saja kepada manusia yang memiliki berbagai hak, melainkan pula kepada pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dapat dipenuhi. Pendekatan ini juga mempertegas keterlibatan orang yang sering bertindak atas nama orang miskin untuk menuntut para pemangku kewajiban (*duty bearers*) agar menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas dan dapat meningkatkan kehidupan orang miskin (Theis, 2003).

Perlu dicatat bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk menjamin dan melindungi warganya melalui sistem hukum, serta menyediakan pelayanan sosial dasar guna memenuhi hak-hak penduduknya. Namun,

keluarga dan masyarakat juga merupakan pemangku kewajiban yang memiliki tugas memenuhi hak-hak para anggotanya.

Kerangka Konseptual

Indikator kemiskinan berbasis hak dapat didefinisikan sebagai data statistik yang menunjukkan perubahan (atau konsistensi) pada kondisi kehidupan, termasuk aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perilaku orang miskin. Selain itu, data ini juga memperlihatkan sesuatu yang penting tentang bagaimana orang miskin saat ini hidup dan bagaimana sebuah masyarakat (negara-bangsa) menjamin kelangsungan hidup mereka.

Perumusan kerangka konseptual yang mantap merupakan langkah awal yang penting dalam merancang kriteria dan indikator kemiskinan. Idealnya kerangka tersebut harus memiliki dasar teoretis maupun empiris, sejalan dengan pemahaman para penggunanya, memperhatikan ketersediaan data, serta mampu menunjukkan variabel-variabel yang mempengaruhi kehidupan orang miskin yang dapat dan mudah diukur. Selain itu, sejarah, keragaman budaya dan mozaik sosio-ekonomi Indonesia mesti dipertimbangkan pula dalam merancang kerangka ini.

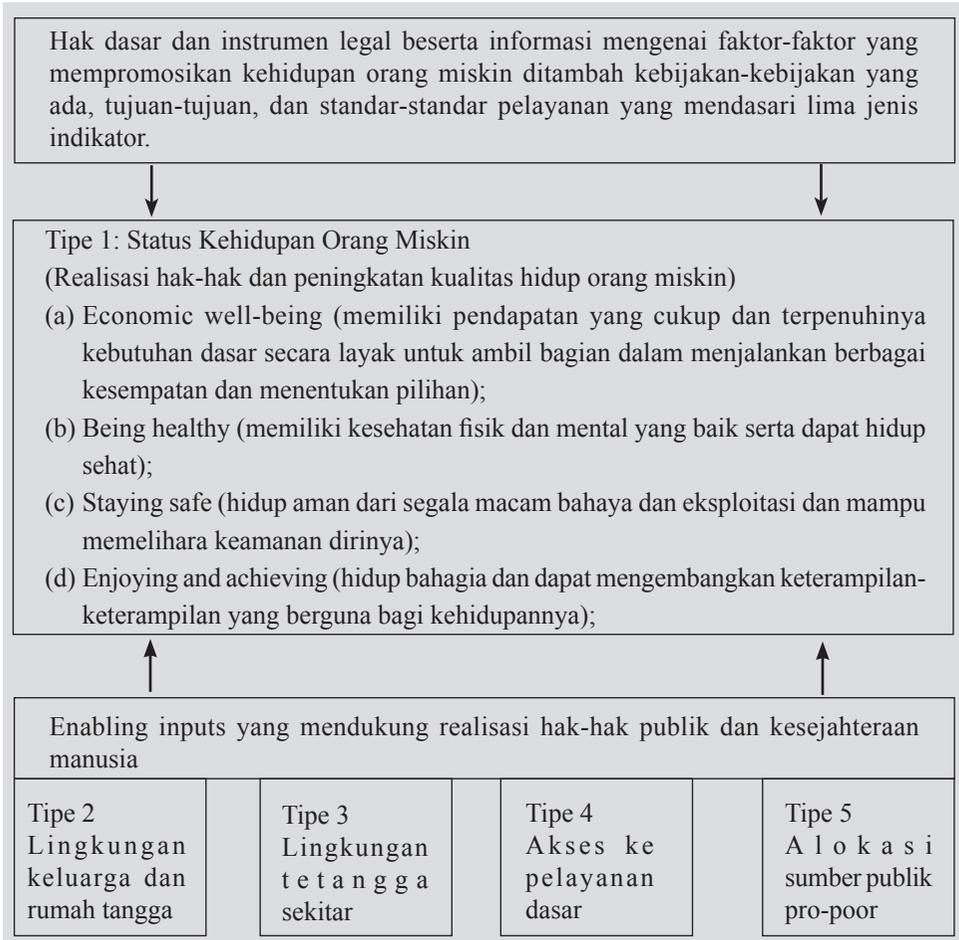
Kerangka konseptual yang ditampilkan Gambar 1 mencakup seperangkat parameter mulai dari kerangka kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak orang miskin hingga lima jenis indikator yang bisa dikembangkan untuk memotret kemiskinan. Secara umum, indikator-indikator yang disajikan menunjukkan lebih dari sekadar kondisi kehidupan orang miskin; yakni mencakup pula kualitas dari konteks perkembangan

orang miskin, situasi lingkungan terdekat, serta pelayanan-pelayanan dasar yang memungkinkan orang miskin memiliki hak untuk dapat mengaksesnya.

Perlu dicatat, indikator-indikator yang disajikan masih bersifat tentatif dan belum

memberi gambaran kasar mengenai fokus pendekatan berbasis hak.

Tipe 1: Status kehidupan orang miskin. Indikator ini mengukur kondisi kehidupan orang miskin, apakah berkaitan dengan aspek ekonomi (Misalnya: pendapatan,



Gambar 1: Kerangka konseptual pendekatan berbasis hak untuk mengukur kemiskinan. Sumber: dikembangkan dari Bradshaw dan Mayhew (2005:3) serta Bray dan Dawes (2007:45)

diuji secara empiris. Selain itu, beberapa indikator mungkin masih terlihat *overlapping* dan dapat masuk ke dalam lebih dari satu tipe indikator. Tujuannya hanya sekadar

mata pencaharian), kesehatan (status kesehatan, gizi, penyakit yang diderita dan perawatannya), pendidikan (partisipasi sekolah, kemampuan membaca), keamanan

(apakah responden pernah menjadi korban kekerasan, eksploitasi).

Tipe 2: Lingkungan keluarga dan rumah tangga. Indikator ini mengukur kualitas *setting* rumah (akses air bersih, sanitasi) maupun relasi sosial antaranggota keluarga (frekuensi makan bersama, melakukan aktivitas bersama).

Tipe 3: Lingkungan ketetanggaaan sekitar. Mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan orang miskin dalam konteks lingkungan sekitar yang terdekat. Menentukan unit pengukuran pada tipe ini tidaklah mudah dan harus dilakukan dengan hati-hati. Ide dasarnya adalah untuk menunjukkan kualitas dan keamanan wilayah tertentu tempat orang miskin tinggal. Misalnya, ketersediaan sarana ibadah, olah raga, rekreasi, lembaga-lembaga sosial, termasuk data tentang kriminalitas atau tingkat partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Tipe 4: Akses ke pelayanan dasar. Mencakup akses kepada berbagai pelayanan publik (dengan apa orang miskin seharusnya memiliki hak mengaksesnya), dan yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan kehidupan orang miskin. Misalnya, akses terhadap fasilitas kesehatan (seperti rumah sakit, Puskesmas, dokter, klinik, petugas kesehatan, dan lain-lain), sekolah, sarana transportasi, media massa (TV, koran, majalah), termasuk lembaga pelayanan sosial.

Tipe 5: Alokasi sumber publik *pro-poor*. Mencakup anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial), pendidikan, dan kesehatan terutama yang ditujukan bagi kelompok miskin.

Tantangan

Jika dipetakan, pendekatan berbasis hak pada dasarnya meliputi tiga tahap pengukuran (Bentley, 2003). Masing-masing tahap memiliki implikasi bagi perumusan desain sistem pengukuran kemiskinan. Namun, merumuskan indikator kemiskinan berbasis hak bukanlah perkara mudah.

1. Analisis status atau kondisi kehidupan orang miskin yang diukur melalui kajian ilmiah mengenai seperangkat standar minimum dan/atau yang berkaitan dengan model sebab-akibat yang telah terbukti dan/atau opini responden yang bersangkutan. Hal ini tidaklah gampang. Mengukur status atau kondisi kehidupan manusia berdasarkan kerangka berbasis hak memerlukan pengukuran fenomena yang konkret dan dapat diobservasi untuk mengidentifikasi apakah standar minimum dapat dipenuhi.
2. Identifikasi pemangku kewajiban: apa yang harus dipenuhi negara dan pemangku kewajiban lainnya. Hakikat kewajiban negara terhadap warganya perlu dijelaskan. Namun, pengamatan terhadap praktik selama ini menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar publik sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya dan komitmen penentu kebijakan. Sebagai contoh, amanat UUD untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional

belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

3. Spesifikasi hak-hak orang miskin dan penyediaan pelayanan untuk memenuhi hak-hak tersebut: kebijakan-kebijakan untuk mengalokasikan sumber-sumber atau menyediakan perlindungan, serta program-program atau proses-proses yang harus dilakukan untuk melaksanakan komitmen tersebut melalui distribusi dan/atau penegakan hukum. Keputusan perlu dibuat berkenaan dengan dokumen-dokumen kebijakan yang tepat untuk menspesifikasikan hak-hak dasar publik. Selain mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang dianut, pemerintah juga perlu menaati konvensi-konvensi dan hukum internasional yang telah diratifikasi (misalnya UDHR, CRC, ICESCR).

Kesimpulan

Pendekatan dalam menentukan kriteria dan indikator kemiskinan yang digunakan selama ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dibandingkan dengan pendahulunya, pendekatan Pembangunan Manusia relatif lebih unggul karena mencakup indikator komposit yang lebih komprehensif. Meskipun pada awalnya beberapa ahli mempertanyakan kegunaan dan

validitasnya, Human Development Index kini semakin populer menjadi parameter pembangunan, termasuk alat pendeteksi kemiskinan, di berbagai belahan dunia.⁴

Makalah ini telah memaparkan pendekatan berbasis hak yang bisa digunakan untuk memperkaya pendekatan yang ada dalam memotret kemiskinan. Intinya menekankan bahwa mengukur kemiskinan perlu diperhatikan bukan saja status orang miskin berdasarkan lensa sosial dan ekonomi, melainkan pula perlu menyentuh hak-hak mereka dan pemangku kewajiban yang memiliki tanggung jawab memenuhi hak-hak orang miskin.

Ini sejalan dengan pernyataan Amartya Sen bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh tidak adanya sumber-sumber, melainkan karena tidak adanya hak (*entitlement*) atas sumber-sumber itu. Kelaparan terjadi sering kali bukan karena tidak cukupnya makanan di wilayah itu, melainkan karena orang miskin tidak memiliki hak atau tidak diperbolehkan memakan makanan yang ada di sana (Suharto, 2008b).

Meskipun masih sangat awal, kiranya pesan yang ingin disampaikan cukup jelas bahwa strategi dalam mengatasi kemiskinan hendaknya diarahkan bukan saja pada orang miskinnya, melainkan pula pada faktor-faktor di luar dirinya yang mempengaruhi kehidupan orang miskin. Semoga makalah ini mendorong diskusi dan kajian-kajian lanjutan yang lebih mendalam.

⁴ V.V. Bhanaji Rao (1991) dan Mark McGillivray (1991) termasuk pakar yang mempertanyakan kemantapan HDI. Dalam artikelnya di *Jurnal World Development*, "The Human Development Index: Yet Another Redundant Composite Development Indicator?" McGillivray (1991: 1461) menyatakan "...the HDI is both flawed in its composition and, like a number of its predecessors, fails to provide insights into inter country development level comparisons which preexisting indicators, including GNP per capita, alone cannot."

Daftar Rujukan

- Bentley, K. 2003. "A Child-Rights Approach to Monitoring and Indicator Development". Makalah yang disajikan pada The HSRC's Child, Youth and Family Development Indicators Project Planning Seminar, HSRC. Cape Town, 17-18 Juli
- Bhanoji Rao, V.V. 1991. "Human Development Report 1990: Review and Assessment" dalam *World Development*. Vol.19, No.10. Hal.1451-1460
- BPS-Statistics, Bappenas, dan UNDP. 2001. *Indonesia Human Development Report, 2001 (Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia)*. Jakarta: BPS-Statistics, Bappenas, UNDP
- Bradshaw, J. dan E. Mayhew (eds.). 2005:3. *The Well-being of Children in the UK*. London: Save the Children Fund UK
- Bray, Rachel dan Andrew Dawes. 2007. "Monitoring the Well-Being of Children: Historical and Conceptual Foundations" dalam Andrew Dawes, Rachel Bray, dan Amelia van der Merwe (eds). *Monitoring Child Well-Being: A South African Rights-Based Approach*. Cape Town: HSRC Press. Hal.5-28
- Haq, Mahbub Ul. 1995. *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press
- McGillivray, Mark. 1991. "The Human Development Index: Yet Another Redundant Composite Development Indicator?" dalam *World Development*. Vol.19, No.10. Hal.1461-1468
- Satterthwaite, David. 1997. "Urban Poverty: Reconsidering its Scale and Nature". *IDS Bulletin*. Vol.28, No.2, pp.9-23
- Suara Pembaruan. 2007. "Tajuk Rencana: Anggaran dan Jumlah Warga Miskin." Jakarta, 2 Februari.
- Suhaimi, Uzair. 2001. "Tinjauan Sepintas mengenai Metode dan Teknik Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia dan Variannya". Makalah pada Lokakarya Teknis Indikator Pembangunan Manusia Tahun 2000. BPS, Jakarta, 10 April
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama (cetakan kedua)
- Suharto, Edi. 2008a. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta (cetakan keempat)
- Suharto, Edi. 2008b. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta (cetakan kedua)
- Theis J. 2003. *Rights-based Monitoring and Evaluation: A Discussion Paper*. Bangkok: Save the Children Alliance
- UNDP. 2007. *Human Development Report 2007/2008 (Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World)*. New York: UNDP